

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2018



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2018

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2018

Katalog : 7203007.72
ISSN : 2354-7456
No. Publikasi : 72540.1906
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 50 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Faizal Anwar

Penanggungjawab:
G.A. Nasser, SE, M.M

Penyunting/Editor:
Amriany Amir, SP, MP

Penyusun:
Astuti Dewi Adiningtyas, SST

<https://sulten.pps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan secara series untuk tahun anggaran 2017 - 2018, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017 - 2018.

Kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu serta penghargaan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu dalam penyediaan data.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, Desember 2019

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Faizal Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. ULASAN RINGKAS	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota	6
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota	13
Lampiran.....	21

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2018 5
Grafik 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2018 6
Grafik 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 7
Grafik 4.1	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2018..... 8
Grafik 4.2	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2018 9
Grafik 4.3	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2018 10
Grafik 4.4	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2018..... 12
Grafik 5.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2018 13
Grafik 6.1	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten <u>B</u> anggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2018..... 14
Grafik 6.2	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2018 15
Grafik 6.3	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2018 16
Grafik 6.4	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2018..... 18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2018 23
Tabel 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2018 24
Tabel 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2018 25
Tabel 4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2018 26
Tabel 5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2018 27
Tabel 6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2018 28
Tabel 7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 – 2018 29
Tabel 8	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 – 2018 30
Tabel 9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 – 2018 31
Tabel 10	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 – 2018..... 32
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 – 2018 33
Tabel 12	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 – 2018 34
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2017 – 2018 35

Tabel 14	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2017 – 2018	36
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2018	37
Tabel 16	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2018	38
Tabel 17	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 – 2018	39
Tabel 18	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 – 2018	40
Tabel 19	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2017 – 2018	41
Tabel 20	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2017 – 2018	42
Tabel 21	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 – 2018	43
Tabel 22	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 – 2018	44
Tabel 23	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 – 2018	45
Tabel 24	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 – 2018	46
Tabel 25	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 – 2018	47
Tabel 26	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 – 2018	48
Tabel 27	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017 – 2018	49

Tabel 28	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017 – 2018	50
----------	--	----

<https://sulteng.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 33 tahun 2004 yang merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah serta Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintahan di daerah saat ini. Penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka tugas pembantuan yang didanai oleh APBN, sedangkan pelaksanaan desentralisasinya didanai APBD. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai, diharapkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita – cita bersama yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis untuk pengambilan keputusan dan memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara, hasil kompilasi data statistik tentang keuangan daerah sangat bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai bahan penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/kota diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten/Kota (PPKAD).

Dalam penyajiannya rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hasil kompilasi daftar K-1 dan K-2 yang telah disiapkan oleh BPS RI. Periode pencatatan

mengacu pada tahun fiskal/anggaran, yakni dari bulan Januari sampai dengan Desember.

1.3 Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung berasal dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan sebagai komponen terbesar Pendapatan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja Daerah terdiri dari bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dari komposisi Belanja Daerah, dapat dilihat program prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

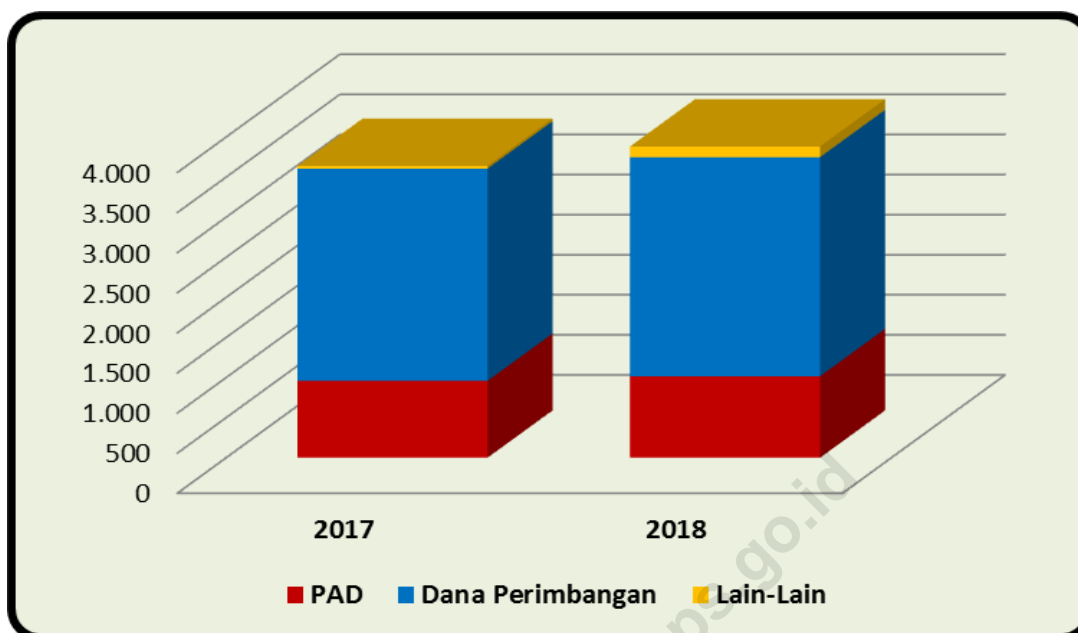
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selama tahun 2018, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sejumlah 3.881,15 miliar rupiah atau meningkat 6,67 persen dari tahun 2017. Pesatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian Pendapatan lainnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing sebesar 304,66 persen dan 6,10 persen. Pada periode yang sama Dana Perimbangan tumbuh sebesar 3,18 persen terutama berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak yakni sebesar 98,32 persen diikuti oleh Bagi Hasil Pajak dengan peningkatan sebesar 11,29 persen.

Pada tahun 2018 kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 70,38 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Daerah, diikuti oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah masing-masing sebesar 26,19 persen dan 3,43 persen.

Grafik 1.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017-2018 (miliar rupiah)**

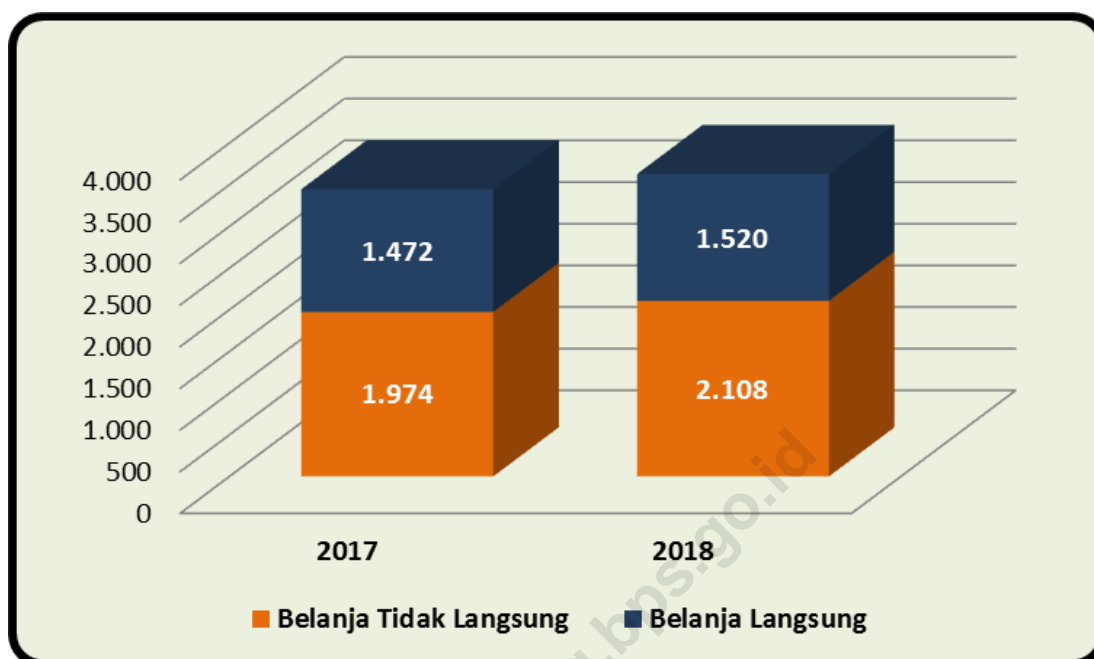


Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2018, total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 3.628,01 miliar rupiah, meningkat 5,29 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 3.445,78 miliar rupiah. Sebesar 58,09 persen realisasi belanja tersebut terserap pada Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 2.107,59 miliar rupiah, sedangkan sebesar 41,91 persen sisanya terserap pada Belanja Langsung yaitu sejumlah 1.520,42 miliar rupiah. Porsi Belanja Pegawai keseluruhan baik yang berasal dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 36,35 persen atau sejumlah 1.318,93 miliar rupiah, sedangkan alokasi untuk Belanja Modal dari total nilai Belanja Daerah hanya sebesar 12,67 persen atau sejumlah 459,78 miliar rupiah mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 13,50 persen atau sebesar 465,12 miliar rupiah.

Grafik 2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2017- 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

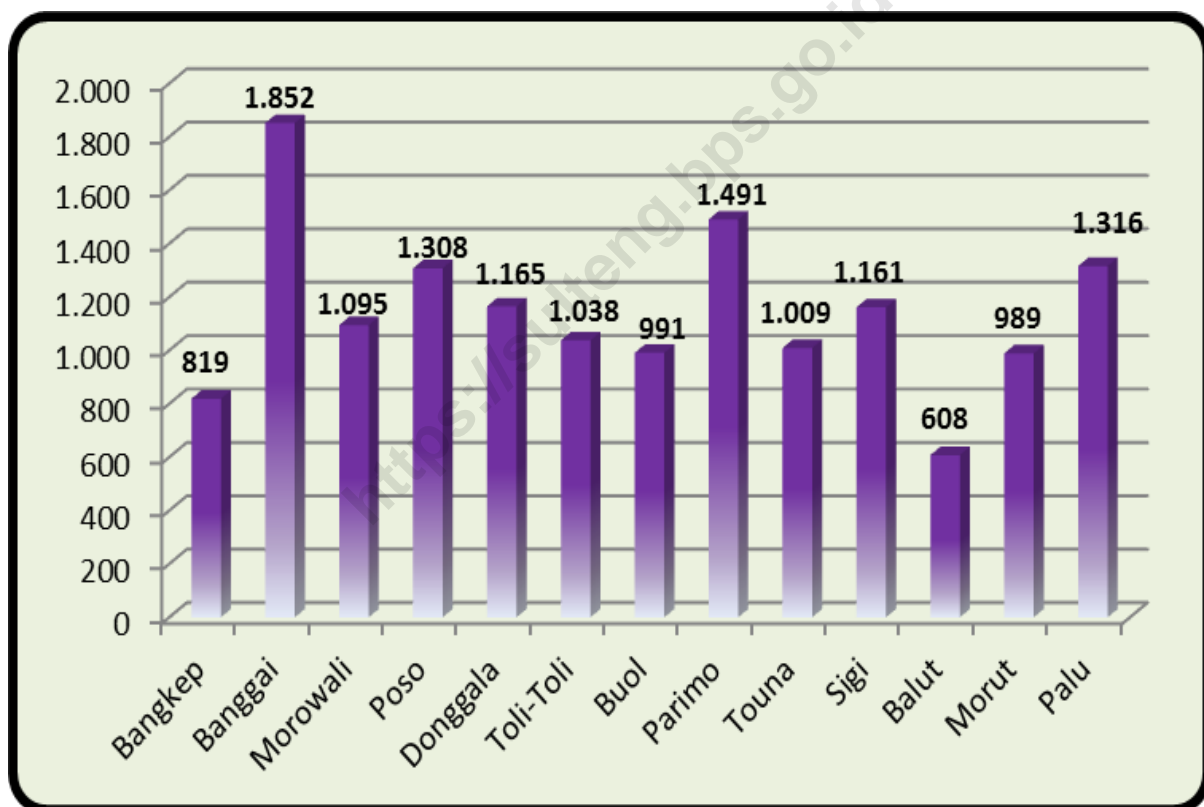
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah terjadi di 8 (delapan) kabupaten, sementara 5 (lima) kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah. Peningkatan realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Morowali Utara yang mencapai 11,15 persen diikuti Kabupaten Banggai Kepulauan yakni sebesar 7,13 persen, dan selanjutnya Kabupaten Sigi sebesar 5,85 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah tertinggi adalah Kabupaten Toli-Toli sebesar -6,27 persen, diikuti Kabupaten Morowali sebesar -4,36 persen, selanjutnya Kabupaten Banggai Laut sebesar -1,84 persen.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan pemerintah daerah. Pada tahun 2018, Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan PAD sebesar 6,36 persen yaitu dari 153,87 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 163,66 miliar rupiah pada tahun 2018.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikasi kemandirian suatu daerah otonomi. Apabila dirinci dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka pada tahun 2018 proporsi tertinggi dicapai oleh Kota Palu sebesar 20,32 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali di urutan kedua sebesar 16,55 persen, dan Kabupaten Parigi Moutong pada urutan ketiga dengan persentase sebesar 10,98 persen. Kabupaten dengan proporsi PAD terendah terhadap total pendapatan daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persentase sebesar 2,92 persen.

Grafik 3.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2018 (miliar rupiah)



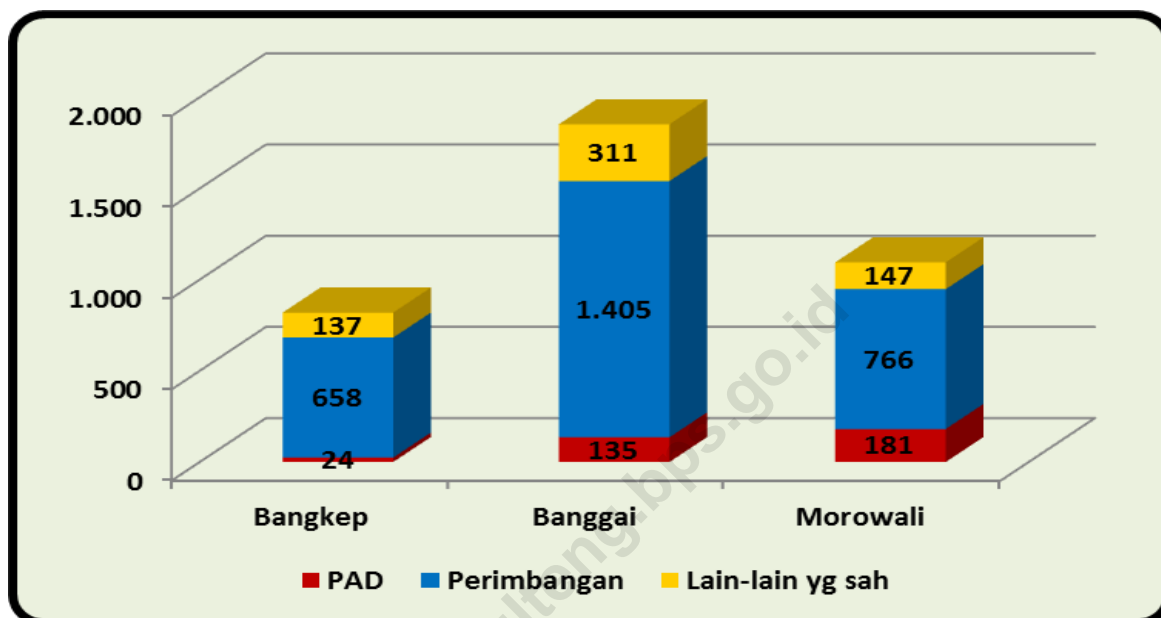
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 mencapai 819,18 miliar rupiah, naik sebesar 7,13 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 764,65. Bila dicermati struktur pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan persentase terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 80,35 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

sebesar 16,73 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 2,92 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Grafik 4.1.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali, Tahun 2018 (miliar rupiah)



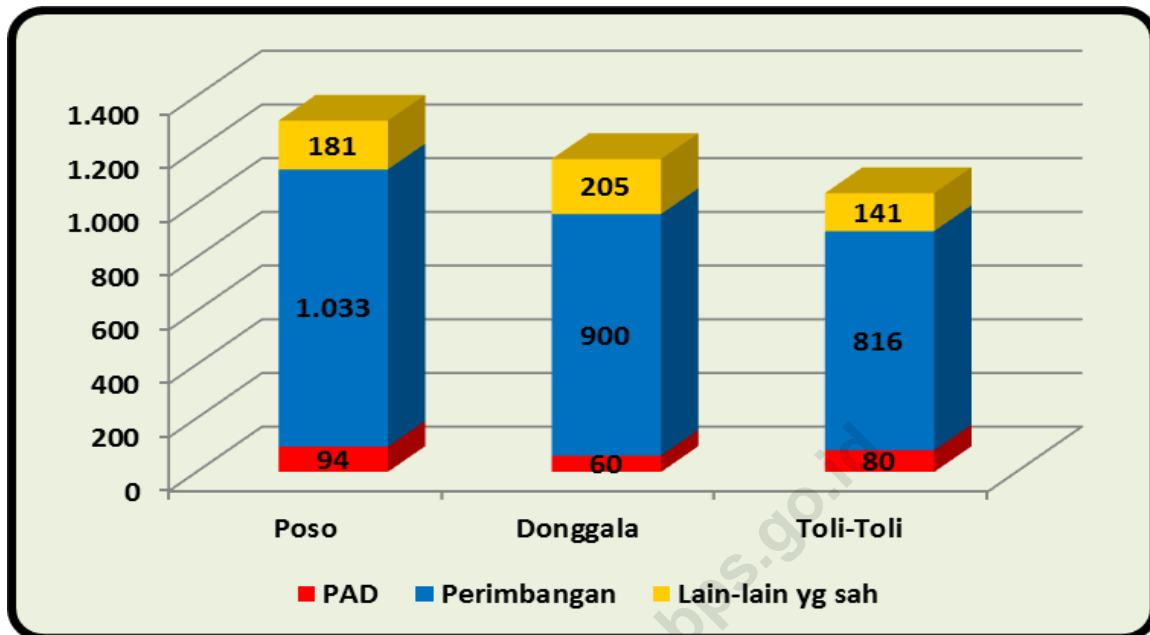
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Banggai tahun 2018 tercatat mengalami penurunan realisasi Pendapatan Daerah sebesar -0,16 persen yaitu dari 1.855,05 miliar rupiah tahun 2017 menjadi 1.852,01 miliar rupiah pada tahun 2018. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2018 tersusun atas 75,87 persen berasal dari dana perimbangan, 16,82 persen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan 7,31 persen Pendapatan Asli Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, Kabupaten Morowali pada tahun 2018 merupakan kabupaten yang mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar -4,36 persen. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Morowali, didominasi oleh dana perimbangan sebesar 70,00 persen, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,55 persen atau sebesar 181,23 miliar rupiah dari total realisasi pendapatan, dan sisanya sebesar 13,45 persen berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Grafik 4.2.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-Toli
Tahun 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso pada tahun 2018 mengalami kenaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 1,59 persen yaitu dari 1.287,41 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 1.307,89 miliar rupiah pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso pada tahun 2018 sebesar 93,86 miliar rupiah dan memberikan andil sebesar 7,18 persen terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Poso. Andil terbesar pendapatan daerah Kabupaten Poso berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 78,95 persen, dan sisanya sebesar 13,87 persen berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

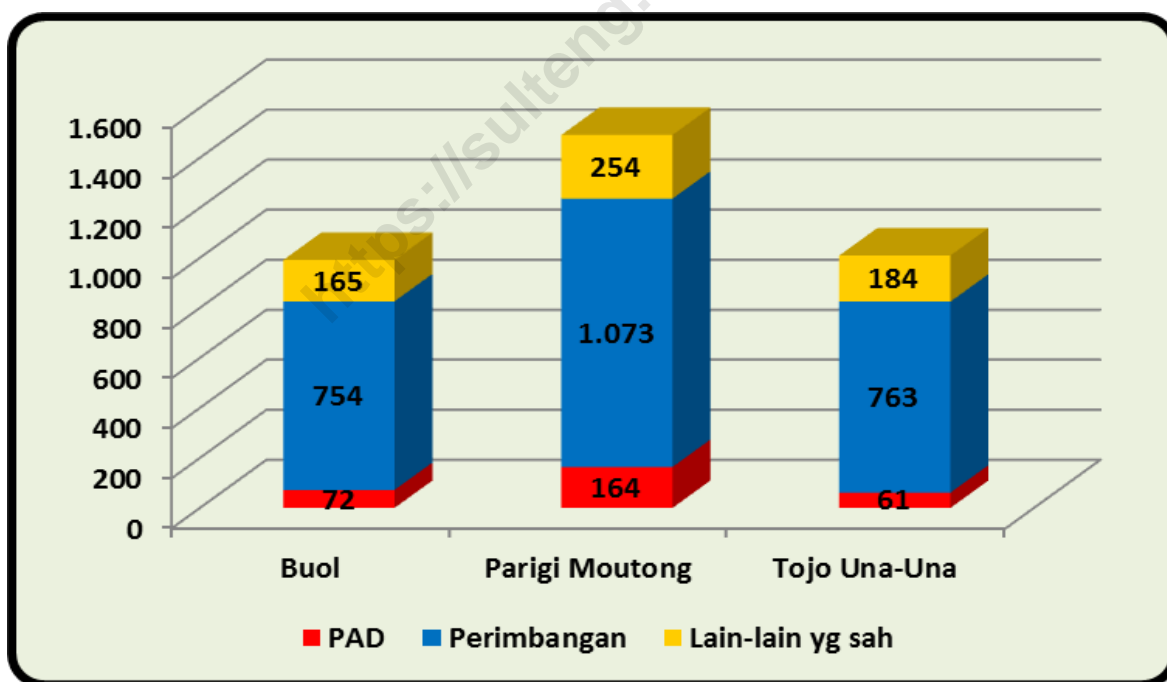
Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Donggala mengalami kenaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,49 persen, yaitu dari 1.136,59 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 1.164,90 miliar rupiah pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan pada dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing naik sebesar 5,48 persen dan 20,71 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 47,12 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Donggala didominasi oleh dana perimbangan sebesar 77,24 persen, diikuti Lain-lain

pendapatan daerah yang sah sebesar 17,59 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 5,16 persen.

Kabupaten Toli-toli pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar -6,27 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan masing-masing turun sebesar -20,10 persen dan -7,36 persen. Sedangkan Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 naik sebesar 12,46 persen. Kontribusi pendapatan daerah kabupaten Toli-toli terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 78,66 persen, diikuti Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,60 persen, dan Pendapatan asli daerah sebesar 7,74 persen.

Grafik 4.3.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2018 sebesar 991,14 miliar rupiah, meningkat 5,58 persen dari tahun sebelumnya sebesar 938,75 miliar rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan daerah, dana perimbangan memberikan andil terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten

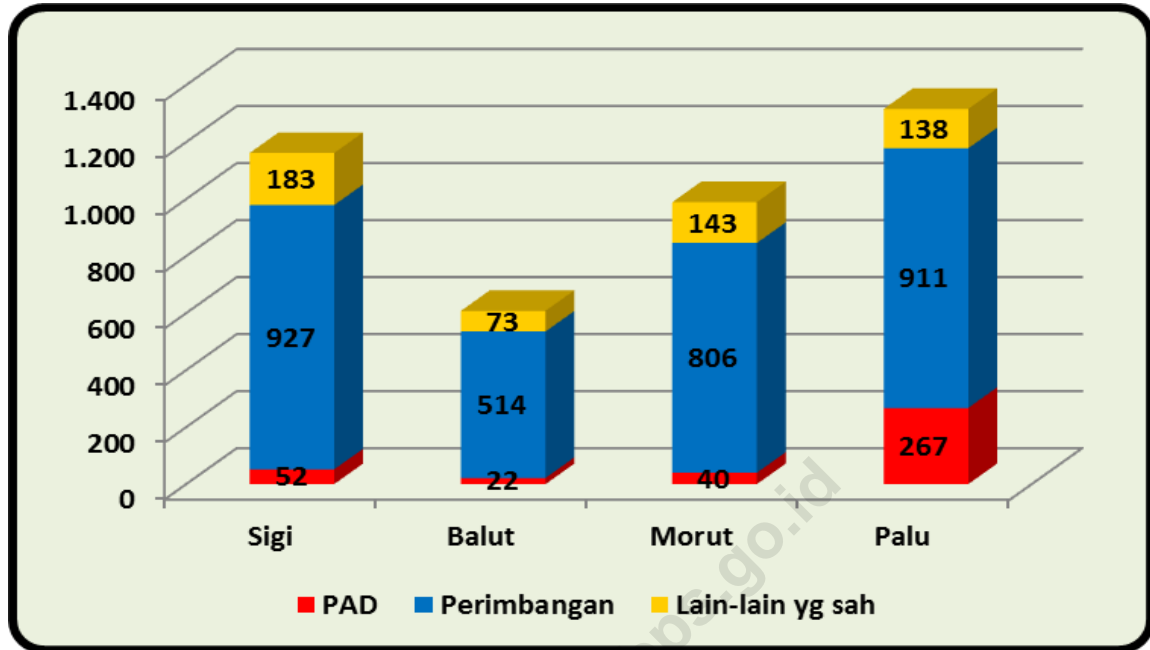
Buol yaitu sebesar 76,08 persen, selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,66 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 7,25 persen.

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2018 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 1.490,82 miliar rupiah atau naik sebesar 2,85 persen dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1.449,46 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan masing-masing sebesar 6,36 persen dan 4,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat struktur pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 71,96 persen, diikuti Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,07 persen, dan Pendapatan asli daerah sebesar 10,98 persen.

Realisasi pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2018 sebesar 1009,03 miliar rupiah atau naik 4,93 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 961,58 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah masing-masing sebesar 1,75 persen dan 36,03 persen. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-una masih sangat didominasi Dana Perimbangan yaitu sebesar 75,67 persen, sedangkan bagian Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing sebesar 6,06 persen dan 18,27 persen.

Realisasi pendapatan Kabupaten Sigi pada tahun 2018 sebesar 1.161,48 miliar rupiah, jumlah ini naik sebesar 5,85 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari struktur pembentuk pendapatan daerah Kabupaten Sigi, Dana Perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 79,83 persen, diikuti oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 15,72 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 4,45 persen terhadap total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sigi.

Grafik 4.4.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut,
Morowali Utara, dan Kota Palu Tahun 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara memiliki Pendapatan Daerah yang cukup kecil. Kabupaten Banggai Laut memiliki Pendapatan Daerah sebesar 607,93 miliar rupiah dimana 84,49 persen diantaranya berasal dari Dana Perimbangan sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 11,93 persen dan 3,58 persen. Keadaan yang hampir sama terjadi di Kabupaten Morowali Utara dimana dari 989,14 miliar rupiah Pendapatan daerah sebesar 81,50 persen berasal dari Dana Perimbangan sisanya 14,45 persen adalah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,05 persen.

Pendapatan Daerah Kota Palu tahun anggaran 2018 sebesar 1.316,09 miliar rupiah atau mengalami penurunan - 1,83 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.340,65 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya komponen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan masing-masing sebesar -5,97 persen dan -1,87 persen, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,60 persen. Pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja daerah

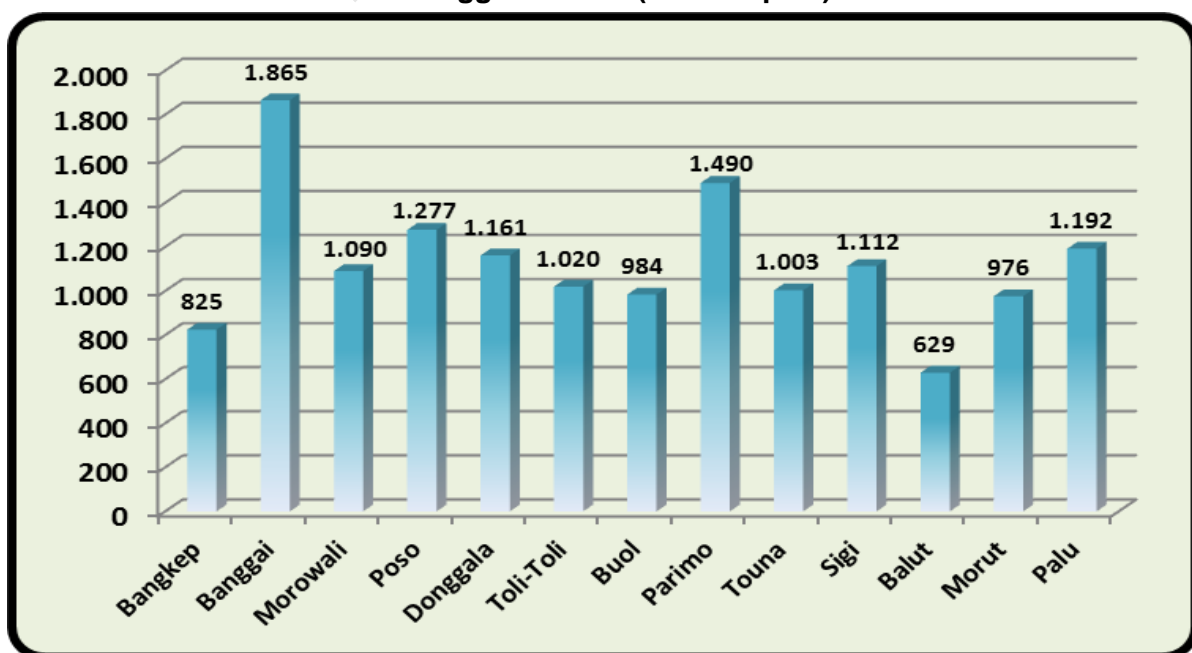
memiliki andil sebesar 20,32 persen terhadap total pendapatan daerah Kota Palu, hal ini menjadikan Kota Palu sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki andil PAD diatas 20 persen. Selanjutnya dana perimbangan dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah memberikan andil terhadap total pendapatan daerah Kota Palu masing-masing sebesar 69,20 persen dan 10,49 persen.

2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi Belanja Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Belanja Daerah terjadi di 10 (sepuluh) kabupaten, sementara 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan realisasi belanja daerah. Peningkatan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Banggai Laut yang mencapai 7,85 persen diikuti Kabupaten Morowali yakni sebesar 6,77 persen, dan selanjutnya Kabupaten Buol sebesar 5,16 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan realisasi belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Toli-toli sebesar -7,36 persen, diikuti Kota Palu sebesar -4,31 persen, selanjutnya Kabupaten Banggai sebesar -4,03 persen.

Gambar. 5

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2018 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

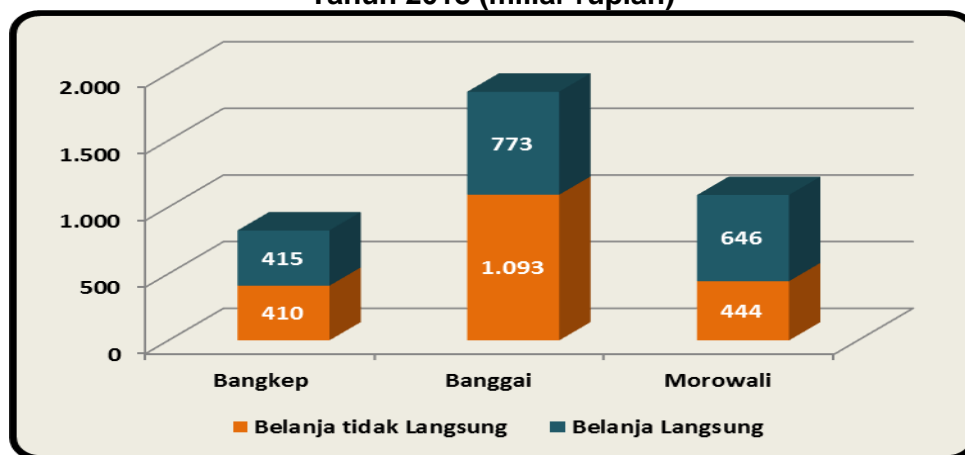
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 mencapai 824,69 miliar rupiah naik 0,33 persen dari tahun sebelumnya sebesar 821,98 miliar rupiah. Komposisi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 49,72 persen Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 410,05 miliar rupiah dan 50,28 persen Belanja Langsung atau setara dengan 414,64 miliar rupiah. Komponen Belanja Langsung didominasi oleh Belanja Modal yang mencapai 48,30 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 40,39 persen dan 11,31 persen sisanya dipergunakan untuk porsi Belanja Pegawai.

Kabupaten Banggai tahun 2018 mencatat realisasi Belanja Daerah sebesar 1.865,24 miliar rupiah, turun sebesar -4,03 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1.943,50 miliar rupiah. Sebesar 58,58 persen direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung sedangkan 41,42 persen untuk Belanja Langsung. Dari 772,63 miliar rupiah Belanja Langsung, sebesar 56,08 persen digunakan untuk Belanja Barang/Jasa sedangkan Belanja Modal dan Belanja Pegawai masing-masing sebesar 39,16 persen dan 4,75 persen.

Pada tahun 2018 Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi sebesar 1.090,37 miliar rupiah, naik 6,77 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 40,72 persen dari total belanja digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan 59,28 persen untuk Belanja Langsung. Struktur Belanja Langsung terdiri dari 47,60 persen Belanja Modal, diikuti 38,51 persen Belanja Barang/Jasa, dan sisanya 13,89 persen digunakan untuk Belanja Pegawai.

Gambar. 6.1.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2018 (miliar rupiah)



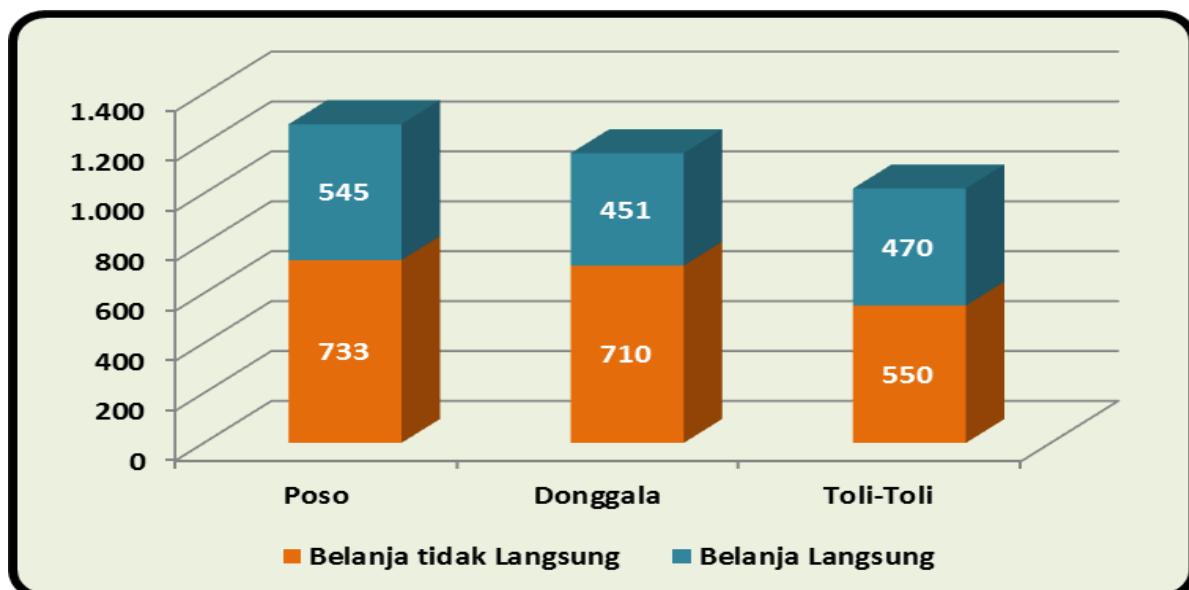
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso tahun 2018 menghabiskan anggaran sebesar 1.277,12 miliar rupiah untuk Belanja Daerah atau mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 57,36 persen, sedangkan Belanja Langsung mendapat porsi sebesar 42,64 persen. Belanja Langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 544,55 miliar rupiah digunakan dengan proporsi untuk Belanja Pegawai sebesar 8,10 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar 50,64 persen dan Belanja Modal sebesar 41,26 persen.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2018 sebesar 1.161,14 miliar rupiah, naik 0,79 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.152,06 miliar rupiah. Porsi belanja Kabupaten Donggala sebesar 61,18 persen dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan sebesar 38,82 persen dialokasikan untuk Belanja Langsung. Dari total belanja langsung sebesar 450,76 miliar rupiah sebesar 54,02 persen digunakan untuk Belanja Barang/Jasa, selanjutnya sebesar 32,72 persen untuk Belanja Modal, dan sisanya 13,27 persen untuk belanja pegawai.

Gambar. 6.2.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-Toli Tahun 2018 (miliar rupiah)

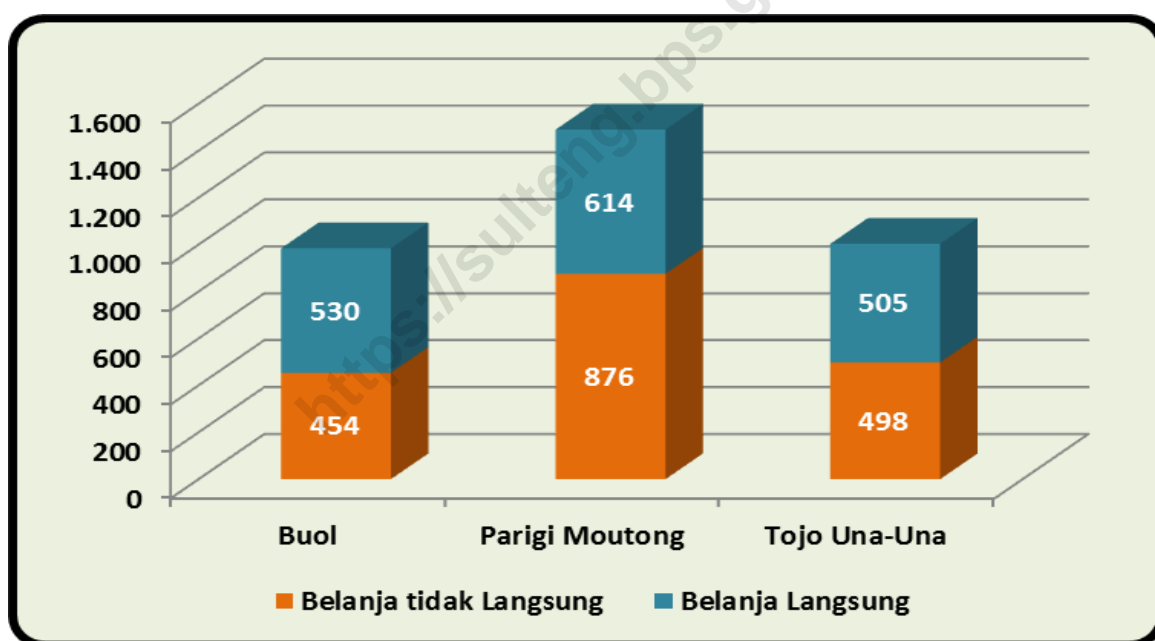


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Total Belanja Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2018 tercatat sebesar 1.019,78 miliar rupiah turun 7,36 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 1.100,85 miliar rupiah. Dari total belanja tersebut Kabupaten Toli-toli mengalokasikan sebesar 53,95 persen untuk belanja tidak langsung dan sisanya sebesar 46,05 persen untuk belanja langsung. Sebesar 50,82 persen dari total 469,56 miliar rupiah Belanja Langsung direalisasikan untuk Belanja Barang/Jasa, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing sebesar 10,07 persen dan 39,10 persen.

Gambar. 6.3.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una Tahun 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

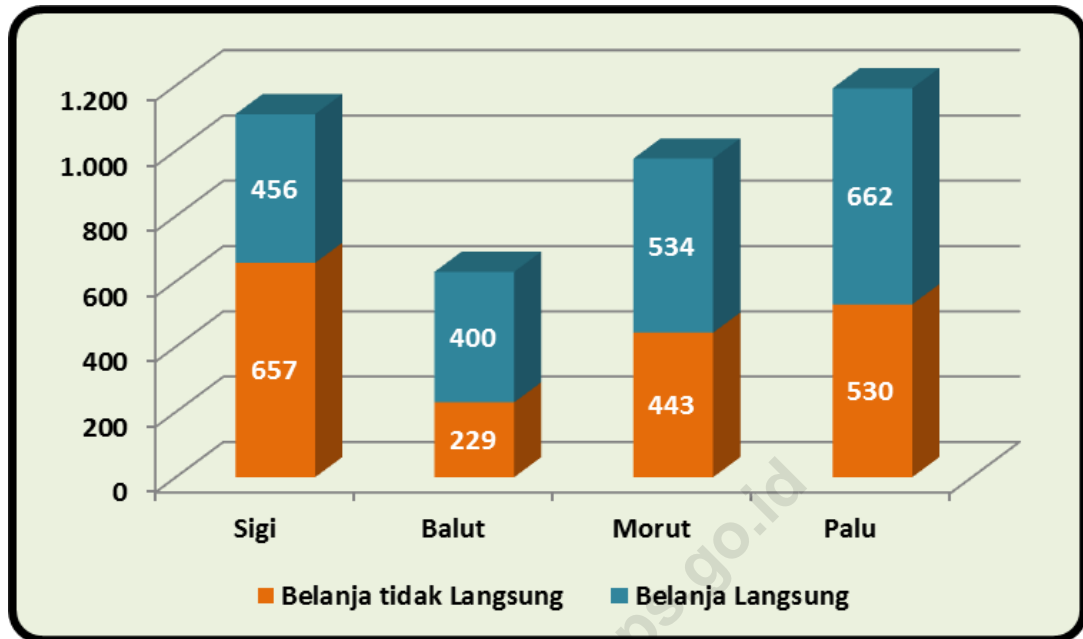
Pada tahun 2017 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol mencapai 935,36 miliar rupiah naik menjadi 983,58 miliar rupiah dengan kenaikan sebesar 5,16 persen pada tahun 2018. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi Belanja Langsung sebesar 53,88 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 46,12 persen. Sebesar 529,97 miliar rupiah total Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Modal sebesar 50,92 persen, untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 39,07 persen, dan untuk Belanja Pegawai sebesar 10,01 persen.

Realisasi Belanja Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2018 sebesar 1.489,91 miliar rupiah, naik 3,51 persen dari tahun 2017 sebesar 1.439,42 miliar rupiah. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 875,59 miliar rupiah atau 58,77 persen dari total belanja, sedangkan Belanja Langsung sebesar 614,32 miliar rupiah. Alokasi dari total Belanja Langsung sebesar 52,96 persen digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing mendapat porsi sebesar 13,27 persen dan 33,77 persen.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 mencapai 1.002,94 miliar rupiah, naik 2,83 persen dari tahun sebelumnya sebesar 975,36 miliar rupiah. Pada tahun 2018 realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 497,90 miliar rupiah, sedangkan bagian Belanja Langsung sebesar 505,03 miliar rupiah. Sebesar 50,36 persen total Belanja Daerah dimanfaatkan untuk Belanja Langsung dengan distribusi Belanja Pegawai sebesar 11,94 persen, Belanja Barang sebesar 49,44 persen dan Belanja Modal sebesar 38,61 persen.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sigi tahun 2018 terealisasi sejumlah 1.112,43 miliar rupiah naik sebesar 2,60 persen. Belanja Tidak Langsung tercatat sejumlah 656,60 miliar rupiah dan Belanja Langsung sejumlah 455,83 miliar rupiah. Total Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 7,81 persen, 58,93 persen dan 33,26 persen.

Gambar. 6.4.
Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2018 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2018 tercatat sebesar 629,44 miliar rupiah naik 7,85 persen dari tahun sebelumnya sebesar 583,63 miliar rupiah. Sebesar 36,43 persen dari total belanja daerah digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sedangkan 63,57 persen digunakan untuk belanja langsung. Dari 400,16 miliar rupiah dana yang dialokasikan untuk Belanja Langsung, sebesar 15,79 persen digunakan untuk Belanja Pegawai, 29,43 persen untuk belanja Barang/Jasa, dan sisanya 54,78 persen untuk Belanja Modal.

Kabupaten Morowali Utara merealisasikan anggaran Belanja sebesar 976,43 miliar rupiah pada tahun 2018. Total anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 442,89 miliar rupiah atau sebesar 45,36 persen dari total belanja daerah, sedangkan Belanja Langsung sebesar 533,54 miliar rupiah atau 54,64 persen dari belanja daerah. Adapun Belanja Langsung yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar 46,86 miliar rupiah atau sebesar 8,78 persen. Sedangkan yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 41,60 persen dan 49,61 persen.

Realisasi Belanja Daerah Kota Palu tahun 2018 sejumlah 1.191,55 miliar rupiah, jumlah ini mengalami penurunan -4,31 persen dari tahun 2017 yang sebesar 1.245,19 miliar rupiah. Porsi Belanja Langsung Tahun 2018 mencapai 661,92 miliar rupiah atau 55,55 persen dari total Belanja Daerah, sedangkan 44,45 persen sisanya direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Porsi terbesar dari Belanja Langsung adalah untuk Belanja Barang dan Jasa yang mencapai 417,17 miliar rupiah atau 63,02 persen. Sementara itu Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 63,41 miliar rupiah (9,58 persen) dan 181,34 miliar rupiah (27,40 persen).

<https://sulteng.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://sulteng.br.id>

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	3 638 342 669	3 881 148 079
1. Pendapatan Asli Daerah	958 212 002	1 016 628 664
1.1. Pajak Daerah	790 439 058	835 456 980
1.2. Retribusi Daerah	8 876 138	11 225 203
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 478 974	16 907 254
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140 417 832	153 039 227
2. Dana Perimbangan	2 647 241 314	2 731 430 164
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	58 864 256	65 512 132
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	65 973 555	130 835 478
2.3. Dana Alokasi Umum	1 546 247 611	1 586 163 908
2.4. Dana Alokasi Khusus	976 155 893	948 918 647
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32 889 353	133 089 252
B. Pembiayaan Daerah	33 051 620	186 399 754
JUMLAH	3 671 394 289	4 067 547 834

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	3.445.777.071	3 628 013 038
1. Belanja Tidak Langsung	1.973.535.890	2 107 589 143
1.1. Belanja Pegawai	1.056.063.909	1 213 130 404
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	500.953.710	474 819 970
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.073.800	1 184 500
1.6. Belanja Bagi Hasil	409.671.450	406 143 965
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	5.639.009	12 072 855
1.8. Belanja Tidak Terduga	134.013	237 450
2. Belanja Langsung	1.472.241.181	1 520 423 895
2.1. Belanja Pegawai	119.857.964	105 802 142
2.2. Belanja Barang dan Jasa	887.262.609	954 840 819
2.3. Belanja Modal	465.120.609	459 780 934
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	225.617.217	439 534 796
JUMLAH	3.671.394.289	4 067 547 834

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	764.650.292	819 184 420
1. Pendapatan Asli Daerah	40.841.503	23 922 233
1.1. Pajak Daerah	5.679.624	5 632 812
1.2. Retribusi Daerah	5.131.212	8 267 733
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	735.421	1 155 602
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.295.246	8 866 086
2. Dana Perimbangan	595.065.929	658 206 306
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	19.386.830	7 442 018
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	20 904 492
2.3. Dana Alokasi Umum	453.262.455	465 346 799
2.4. Dana Alokasi Khusus	122.416.644	164 512 997
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	128.742.860	137 055 881
B. Pembiayaan Daerah	106.238.755	42 037 945
JUMLAH	870.889.047	861 222 365

Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	821.976.102	824 687 940
1. Belanja Tidak Langsung	399.077.267	410 051 486
1.1. Belanja Pegawai	231.969.079	254 970 913
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	1.840.000	3 380 400
1.5. Belanja Bantuan Sosial	360.000	369 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	1.794.803	912 297
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	161.613.385	149 716 742
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.500.000	702 134
2. Belanja Langsung	422.898.835	414 636 454
2.1. Belanja Pegawai	37.675.445	46 886 907
2.2. Belanja Barang dan Jasa	145.395.229	167 465 859
2.3. Belanja Modal	239.828.161	200 283 688
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	48.912.945	36 534 425
JUMLAH	870.889.047	861 222 365

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.855.045.844	1 852 008 921
1. Pendapatan Asli Daerah	186.690.738	135 426 631
1.1. Pajak Daerah	45.234.040	43 424 956
1.2. Retribusi Daerah	11.120.953	9 765 452
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.503.841	2 591 878
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.831.904	79 644 345
2. Dana Perimbangan	1.400.150.085	1 405 113 853
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	163.741.270	69 452 207
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	217 006 962
2.3. Dana Alokasi Umum	866.617.294	869 604 156
2.4. Dana Alokasi Khusus	369.791.521	249 050 528
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	268.205.021	311 468 437
B. Pembiayaan Daerah	111.334.926	30 644 861
JUMLAH	1.966.380.770	1 882 653 782

Tabel 6. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.943.503.515	1 865 244 053
1. Belanja Tidak Langsung	979.477.935	1 092 613 635
1.1. Belanja Pegawai	618.976.924	731 868 493
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	201.996	302 994
1.4. Belanja Hibah	12.245.147	19 949 533
1.5. Belanja Bantuan Sosial	782.500	-
1.6. Belanja Bagi Hasil	7.137.289	8 066 700
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	339.134.079	332 308 564
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.000.000	117 351
2. Belanja Langsung	964.025.580	772 630 418
2.1. Belanja Pegawai	55.319.900	36 724 474
2.2. Belanja Barang dan Jasa	417.602.246	433 308 322
2.3. Belanja Modal	491.103.434	302 597 621
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	22.877.255	17 409 730
JUMLAH	1.966.380.770	1 882 653 782

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.144.840.491	1 094 918 270
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	190.571.540	181 232 941
1.1. Pajak Daerah	36.878.404	45 496 062
1.2. Retribusi Daerah	101.253.102	74 914 511
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.746.736	1 521 872
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.693.298	59 300 496
2. Dana Perimbangan	736.648.490	766 396 332
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	46.673.719	14 480 399
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	54 251 915
2.3. Dana Alokasi Umum	506.862.674	498 783 134
2.4. Dana Alokasi Khusus	183.112.097	198 880 884
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	217.620.461	147 288 997
B. Pembiayaan Daerah	(119.436.159)	2 320 321
JUMLAH	1.025.404.332	1 097 238 591

Tabel 8. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.021.213.635	1 090 373 004
1. Belanja Tidak Langsung	432.277.652	444 025 276
1.1. Belanja Pegawai	258.160.934	256 801 662
1.2. Belanja Bunga	1.590.726	1 538 345
1.3. Belanja Subsidi	1.811.975	-
1.4. Belanja Hibah	16.995.179	44 890 252
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7.809.000	922 810
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	142.703.792	136 838 307
1.8. Belanja Tidak Terduga	3.206.046	3 033 900
2. Belanja Langsung	588.935.983	646 347 728
2.1. Belanja Pegawai	59.758.471	89 775 670
2.2. Belanja Barang dan Jasa	200.914.002	248 881 910
2.3. Belanja Modal	328.263.510	307 690 148
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	4.190.697	6 865 587
JUMLAH	1.025.404.332	1 097 238 591

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.287.408.975	1 307 886 138
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	110.337.795	93 858 396
1.1. Pajak Daerah	14.823.015	18 915 571
1.2. Retribusi Daerah	7.436.637	8 697 897
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.770.189	2 419 089
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	85.307.954	63 825 839
2. Dana Perimbangan	1.020.817.735	1 032 568 226
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	21.122.603	11 108 335
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	22 700 900
2.3. Dana Alokasi Umum	719.435.512	723 089 621
2.4. Dana Alokasi Khusus	280.259.620	275 669 370
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	156.253.445	181 459 516
B. Pembiayaan Daerah	13.041.798	20 674 506
JUMLAH	1.300.450.773	1 328 560 644

Tabel 10. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.275.776.267	1 277 116 773
1. Belanja Tidak Langsung	713.188.617	732 562 836
1.1. Belanja Pegawai	507.092.660	526 950 246
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	7.694.330	10 391 258
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4.066.243	3 363 239
1.6. Belanja Bagi Hasil	2.301.248	3 532 290
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	192.001.498	187 552 716
1.8. Belanja Tidak Terduga	32.638	773 087
2. Belanja Langsung	562.587.650	544 553 937
2.1. Belanja Pegawai	39.504.708	44 104 857
2.2. Belanja Barang dan Jasa	261.222.678	275 760 251
2.3. Belanja Modal	261.860.264	224 688 829
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	24.674.506	51 443 871
JUMLAH	1.300.450.773	1 328 560 644

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.136.593.525	1 164 902 561
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	113.730.072	60 135 252
1.1. Pajak Daerah	28.670.668	28 324 968
1.2. Retribusi Daerah	2.251.342	1 850 179
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.645.844	2 305 235
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.162.218	27 654 871
2. Dana Perimbangan	853.072.587	899 815 215
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	25.274.648	10 276 304
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	21 157 544
2.3. Dana Alokasi Umum	652.945.096	659 731 826
2.4. Dana Alokasi Khusus	174.852.843	208 649 541
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	169.790.866	204 952 094
B. P Pembiayaan Daerah	20.147.256	4 189 931
JUMLAH	1.156.740.781	1 169 092 492

Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.152.060.267	1 161 139 685
1. Belanja Tidak Langsung	649.780.621	710 381 093
1.1. Belanja Pegawai	425.634.441	472 115 068
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	26.650.432	37 873 545
1.5. Belanja Bantuan Sosial	560.152	2 849 716
1.6. Belanja Bagi Hasil	622.607	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	193.971.318	190 990 197
1.8. Belanja Tidak Terduga	2.341.671	6 552 568
2. Belanja Langsung	502.279.647	450 758 592
2.1. Belanja Pegawai	72.079.470	59 795 036
2.2. Belanja Barang dan Jasa	263.535.876	243 485 465
2.3. Belanja Modal	166.664.300	147 478 090
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	4.079.513	7 952 808
JUMLAH	1.156.139.780	1 169 092 492

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.107.426.358	1 037 997 709
1. Pendapatan Asli Daerah	100.514.206	80 312 116
1.1. Pajak Daerah	12.659.752	16 543 712
1.2. Retribusi Daerah	4.028.450	4 494 775
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.560.623	2 853 092
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	81.265.381	56 420 537
2. Dana Perimbangan	881.358.339	816 482 058
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	20.931.342	26 238 034
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	5 658 643
2.3. Dana Alokasi Umum	612.841.706	618 784 625
2.4. Dana Alokasi Khusus	247.585.291	165 800 756
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	125.553.813	141 203 535
B. Pembiayaan Daerah	3.229.075	2 208 764
JUMLAH	1.110.655.433	1 040 206 473

Tabel 14. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.100.849.886	1 019 779 241
1. Belanja Tidak Langsung	578.210.679	550 215 081
1.1. Belanja Pegawai	408.842.146	405 643 533
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	8.088.912	7 211 243
1.5. Belanja Bantuan Sosial	453.900	1 023 986
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	158.967.551	135 221 523
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.858.170	1 114 796
2. Belanja Langsung	522.639.207	469 564 160
2.1. Belanja Pegawai	41.930.679	47 296 112
2.2. Belanja Barang dan Jasa	214.737.916	238 647 029
2.3. Belanja Modal	265.970.611	183 621 019
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	9.805.547	20 427 232
JUMLAH	1.110.655.433	1 040 206 473

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	938.746.233	991 137 059
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	76.219.455	71 898 558
1.1. Pajak Daerah	6.514.457	7 067 101
1.2. Retribusi Daerah	2.546.908	2 343 026
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.929.178	1 692 301
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	65.228.911	60 796 129
2. Dana Perimbangan	739.093.441	754 100 548
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	21.038.268	10 813 904
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	22 361 711
2.3. Dana Alokasi Umum	527.418.461	528 033 354
2.4. Dana Alokasi Khusus	190.636.713	192 891 579
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	123.433.337	165 137 953
B. Pembiayaan Daerah	12.266.808	7 486 035
JUMLAH	951.013.041	998 623 094

Tabel 16. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	935.356.140	983 582 356
1. Belanja Tidak Langsung	459.143.803	453 615 005
1.1. Belanja Pegawai	292.594.417	296 505 261
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	14.424.734	9 036 540
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8.439.738	9 043 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	935.453	897 205
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	141.859.165	137 280 755
1.8. Belanja Tidak Terduga	890.296	852 244
2. Belanja Langsung	476.212.337	529 967 351
2.1. Belanja Pegawai	54.598.521	53 055 483
2.2. Belanja Barang dan Jasa	184.686.231	207 058 594
2.3. Belanja Modal	236.927.585	269 853 275
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	15.656.901	15 040 738
JUMLAH	951.013.041	998 623 094

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.449.457.798	1 490 820 673
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	153.873.011	163 657 795
1.1. Pajak Daerah	15.740.486	15 478 606
1.2. Retribusi Daerah	7.609.114	12 744 332
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.322.911	1 152 608
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	129.200.500	134 282 249
2. Dana Perimbangan	1.030.951.164	1 072 722 650
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	21.909.233	9 994 831
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11.555.231	22 396 264
2.3. Dana Alokasi Umum	740.305.507	749 704 872
2.4. Dana Alokasi Khusus	268.736.424	290 626 683
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	264.633.623	254 440 228
B. Pembiayaan Daerah	53.304.244	57 807 326
JUMLAH	1.502.762.042	1 548 627 999

Tabel 18. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.439.423.291	1 489 909 477
1. Belanja Tidak Langsung	824.627.298	875 591 184
1.1. Belanja Pegawai	488.194.316	508 180 843
1.2. Belanja Bunga	902.506	735 726
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	27.960.316	66 504 523
1.5. Belanja Bantuan Sosial	9.841.430	9 826 785
1.6. Belanja Bagi Hasil	1.798.272	2 106 744
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	295.389.146	287 694 207
1.8. Belanja Tidak Terduga	541.312	542 356
2. Belanja Langsung	614.795.993	614 318 293
2.1. Belanja Pegawai	71.399.223	81 524 141
2.2. Belanja Barang dan Jasa	309.915.599	325 355 664
2.3. Belanja Modal	233.481.171	207 438 488
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	63.338.751	58 718 521
JUMLAH	1.502.762.042	1 548 627 999

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	961.582.935	1 009 031 688
1. Pendapatan Asli Daerah	75.671.645	61 148 550
1.1. Pajak Daerah	10.131.458	11 368 342
1.2. Retribusi Daerah	1.488.387	2 163 671
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.190.304	2 165 613
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	61.861.496	45 450 924
2. Dana Perimbangan	750.356.886	763 486 383
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	24.935.336	8 369 699
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	23 097 136
2.3. Dana Alokasi Umum	551.607.986	567 372 983
2.4. Dana Alokasi Khusus	173.813.564	164 646 565
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	135.554.404	184 396 755
B. Pembiayaan Daerah	53.579.690	39 802 096
JUMLAH	1.015.162.625	1 048 833 784

Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	975.362.670	1 002 935 084
1. Belanja Tidak Langsung	461.957.389	497 903 460
1.1. Belanja Pegawai	282.654.017	315 457 901
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	296.238	295 447
1.4. Belanja Hibah	8.055.189	10 181 529
1.5. Belanja Bantuan Sosial	6.038.000	5 650 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	763.232	1 132 391
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	164.082.871	164 943 701
1.8. Belanja Tidak Terduga	67.842	242 491
2. Belanja Langsung	513.405.281	505 031 624
2.1. Belanja Pegawai	77.055.296	60 321 692
2.2. Belanja Barang dan Jasa	223.420.291	249 710 036
2.3. Belanja Modal	212.929.694	194 999 895
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	39.799.955	45 898 700
JUMLAH	1.015.162.625	1 048 833 784

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.097.233.336	1 161 475 656
1. Pendapatan Asli Daerah	76.602.666	51 652 716
1.1. Pajak Daerah	10.723.408	7 639 413
1.2. Retribusi Daerah	2.574.733	2 110 754
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	811.958	817 513
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.492.567	41 085 036
2. Dana Perimbangan	844.248.207	927 246 615
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	19.101.618	9 388 787
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	27 517 475
2.3. Dana Alokasi Umum	629.910.031	634 133 821
2.4. Dana Alokasi Khusus	195.236.558	256 206 532
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	176.382.463	182 576 325
B. Pembiayaan Daerah	20.216.671	32 215 800
JUMLAH	1.117.450.007	1 193 691 456

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.084.234.206	1 112 428 389
1. Belanja Tidak Langsung	612.242.995	656 602 825
1.1. Belanja Pegawai	401.595.033	440 811 276
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	6.445.040	7 922 400
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.605.000	10 135 471
1.6. Belanja Bagi Hasil	794.025	1 383 343
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	201.753.036	194 350 335
1.8. Belanja Tidak Terduga	50.861	2 000 000
2. Belanja Langsung	471.991.211	455 825 564
2.1. Belanja Pegawai	6.520.053	35 596 241
2.2. Belanja Barang dan Jasa	260.643.117	268 619 188
2.3. Belanja Modal	204.828.041	151 610 135
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	33.215.801	81 263 067
JUMLAH	1.117.450.007	1 193 691 456

Tabel 23. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	619.309.794	607 926 367
1. Pendapatan Asli Daerah	30.317.152	21 776 179
1.1. Pajak Daerah	5.148.124	5 265 630
1.2. Retribusi Daerah	6.651.958	7 659 918
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	233 726
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	18.517.070	8 616 905
2. Dana Perimbangan	526.435.473	513 644 852
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	19.100.292	6 818 041
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	20 990 401
2.3. Dana Alokasi Umum	362.972.147	397 037 063
2.4. Dana Alokasi Khusus	144.363.034	88 799 347
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	62.557.169	72 505 336
B. Pembiayaan Daerah	72.606.119	104 395 567
JUMLAH	691.915.913	712 321 934

Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	583.627.646	629 435 117
1. Belanja Tidak Langsung	228.838.571	229 277 445
1.1. Belanja Pegawai	115.250.649	123 529 431
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	6.092.710	6 148 200
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	5 970 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	901.129	451 906
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	106.594.083	91 970 007
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	1 207 901
2. Belanja Langsung	354.789.075	400 157 672
2.1. Belanja Pegawai	43.667.176	63 187 024
2.2. Belanja Barang dan Jasa	114.084.814	117 769 376
2.3. Belanja Modal	197.037.085	219 201 271
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	108.288.267	82 886 817
JUMLAH	691.915.913	712 321 934

Tabel 25. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	889.947.144	989 137 929
1. Pendapatan Asli Daerah	54.607.359	40 010 721
1.1. Pajak Daerah	9.637.182	14 862 695
1.2. Retribusi Daerah	15.607.728	13 671 532
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	566.005	493 140
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	28.796.444	10 983 354
2. Dana Perimbangan	709.105.747	806 178 364
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	38.132.593	13 414 038
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	26 553 156
2.3. Dana Alokasi Umum	547.360.397	558 773 483
2.4. Dana Alokasi Khusus	123.612.757	207 437 687
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	126.234.038	142 948 844
B. Pembiayaan Daerah	61.934.967	5 474 511
JUMLAH	951.882.111	994 612 440

Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	937.077.582	976 426 203
1. Belanja Tidak Langsung	429.003.624	442 890 661
1.1. Belanja Pegawai	265.959.120	279 749 897
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	2.263.350	2 433 850
1.5. Belanja Bantuan Sosial	77.000	1 839 200
1.6. Belanja Bagi Hasil	270.440	225 232
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	158.841.487	156 940 868
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.592.227	1 701 614
2. Belanja Langsung	508.073.957	533 535 542
2.1. Belanja Pegawai	47.008.044	46 864 565
2.2. Belanja Barang dan Jasa	217.593.192	221 958 702
2.3. Belanja Modal	243.472.721	264 712 275
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	14.804.529	18 186 237
JUMLAH	951.882.111	994 612 440

Tabel 27. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.340.647.283	1 316 087 928
1. Pendapatan Asli Daerah	284.380.010	267 401 948
1.1. Pajak Daerah	114.598.205	110 739 727
1.2. Retribusi Daerah	14.316.839	11 794 056
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.536.110	2 209 627
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	152.928.856	142 658 539
2. Dana Perimbangan	928.017.146	910 693 128
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	33.148.909	22 736 634
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	21 184 867
2.3. Dana Alokasi Umum	671.600.535	671 600 535
2.4. Dana Alokasi Khusus	223.267.702	195 171 092
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	128.250.126	137 992 852
B. Pembiayaan Daerah	1.578.996	71 473 484
JUMLAH	1.342.226.279	1 387 561 412

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1.245.186.846	1 191 550 500
1. Belanja Tidak Langsung	535.864.560	529 634 595
1.1. Belanja Pegawai	522.743.975	519 532 991
1.2. Belanja Bunga	2.854.856	761 708
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	5.580.835	7 336 125
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4.062.756	27 750
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	619.470	366 750
1.8. Belanja Tidak Terduga	2.668	1 609 270
2. Belanja Langsung	709.322.285	661 915 905
2.1. Belanja Pegawai	56.910.254	63 410 463
2.2. Belanja Barang dan Jasa	401.311.517	417 168 202
2.3. Belanja Modal	251.100.514	181 337 241
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	97.039.433	196 010 912
JUMLAH	1.342.226.279	1 387 561 412



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48 Palu 94114 Telp (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Website: <https://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISSN: 2354-7456



9 772354 745005